ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR

(Studi kasus pada pemerintah daerah Kota Surabaya, Kota Malang,
Kabupaten Malang dan Kota Batu Tahun Anggaran 2016 - 2020)

Syaukan Baiquni¹, Tantri Bararoh², Akhmad Zaenuddin³

syaukan22@gmail.com¹

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ABSTRAK

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki fungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga laporan keuangan tersebut harus dibuat secara sederhana supaya mudah untuk dipahami. Namun demikian, tidak semua pemangku kepentingan dapat memahami akuntansi yang merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan. Oleh sebab itu tidak mampuan memahami dan menginterpretasikan laporan tersebut perlu dibantu dengan cara Analisis Laporan Keuangan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, untuk mengukur kinerja keuangan, digunakan beberapa analisis antara lain, Analisis Aset, Analisis Kewajiban dan Ekuitas, Analisis Realisasi Pendapatan dan Belanja dan Analisis Arus Kas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Surabaya, Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu memiliki kinerja keuangan yang baik. Namun masing-masing Pemerintah Daerah memiliki karakteristik & kebijakan yang berbeda satu sama lain, sehingga menghasilkan kinerja keuangan yang berbeda.

Kata Kunci : Laporan Keuangan, Analisis Laporan Keuangan, Kinerja Keuangan.

ABSTRACT

Local Government Financial Statements have a function as a basis for decision making, so that the financial statements must be made in a simple manner so that they are easy to understand. However, not all stakeholders can understand accounting which is a tool to produce financial statements. Therefore, the inability to understand and interpret the report needs to be assisted by means of Financial Statement Analysis. The method used in this research is descriptive qualitative, to measure financial performance, several analyses are used, among others, Asset Analysis, Liability and Equity Analysis, Revenue and Expenditure Realization Analysis and Cash Flow Analysis. The results showed that Surabaya City, Malang City, Distric Malang and Batu City had good financial performance. However, each Local Government has different characteristics & policies from one another, resulting in different financial performance.

Keywords : Financial Statements, Financial Statement Analysis, Financial Performance.

PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan pihak yang dipercaya oleh rakyat guna mengatur dan meyelenggarakan pemerintahan untuk memenuhi hajat hidup masing – masing individu. Sebagai organisasi yang berorientasi non-profit, pemerintah daerah mempunyai tujuan utama adalah untuk memberikan pelayanan yang Optimal kepada masyarakat, antara lain : pendidikan, kesehatan, keamanan, infrastruktur. Oleh sebab itu tugas dan tanggung jawab tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka harus ada sebuah bentuk pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat.

Masing – masing pemerintah daerah baik itu yang berada di tingkat provinsi, kabupaten atau kota mempunyai kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban

keuangan secara berkala. Laporan keuangan tersebut disusun sesuai dengan aturan yang berlaku. Analisis laporan keuangan merupakan salah satu cara yang bertujuan untuk melihat dan menilai kinerja setiap daerah dalam pengelolaan keuangannya. menurut “undang – undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka setiap pengelola keuangan daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawabannya meliputi, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.”

Dalam “undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa Laporan Keuangan yang dimaksud harus disusun melalui proses akuntansi, yang wajib dipatuhi oleh setiap pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran serta bendahara umum daerah. Penyajian laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban secara tertulis atas kinerja keuangan yang telah dicapai oleh masing – masing pemerintah daerah”.

“Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan, laporan keuangan memiliki peran untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan kegiatan transaksi selama periode tertentu”. Laporan keuangan pemerintah daerah memiliki fungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, hal ini mengharuskan pembuatan laporan keuangan dilakukan secara sederhana agar mudah dipahami oleh pihak – pihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut. Meski sudah dibuat secara sederhana namun tidak semua pemangku kepentingan dapat memahami & menginterpretasikan laporan tersebut, oleh sebab itu maka perlu dibantu dengan membuat analisis laporan keuangan.

“Dampak dari diterapkannya standar dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah menjadi luas dan memiliki ketepatan waktu lebih baik. Hal ini berpengaruh pada tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah daerah. Karena saat ini masyarakat lebih mengerti bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah menjadi konsumsi semua lapisan masyarakat sebagai alat untuk mengkritisi dan menilai kinerja pemerintah daerah.

Dalam pengukuran kinerja pemerintah diperlukan beberapa indikator yang dapat dinyatakan dengan jelas” (Mardiasno, 2007). “Kinerja pemerintah biasanya dinyatakan dengan ekonomis, efektif dan efisien dengan konsep pengukuran kinerja value for money, Ekonomis adalah konsep yang berkaitan antara jumlah input dengan nilai input, sementara efisien merupakan perbandingan antara jumlah input dengan output dan efektifitas berkaitan dengan output dan outcome”. Menurut (Mahmudi, 2007) kinerja keuangan tersebut dinyatakan dengan rasio keuangan yang diidentifikasi dari laporan keuangan pemerintah daerah.

Penggunaan rasio keuangan pada organisasi sektor publik khususnya pemerintah daerah belum banyak dilakukan jika dibandingkan dengan sektor privat hal ini disebabkan, antara lain :

1. Keterbatasan penyajian laporan keuangan pada pemerintah daerah dimana sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan organisasi sektor privat.
2. Penilaian keberhasilan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah lebih di tekan kan pada target, sehingga kurang memperhatikan perubahan yang terjadi pada komposisi ataupun struktur APBD.

Menurut (Saputra et al. 2018), “penelitian yang berjudul analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di kabupaten jembrana tahun anggaran 2010 – 2014”. Menyimpulkan bahwa dilihat dari

analisis varians, pendapatan termasuk dalam kategori baik., dilihat dari rasio derajat desentralisasi termasuk dalam kategori sangat kurang, dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah termasuk kategori rendah sekali dengan pola hubungan instruktif. Ini menandakan bahwa peranan pemerintah pusat masih sangat dominan. Dilihat dari pertumbuhan pendapatan dikategorikan pertumbuhannya positif kaerah pemerintah daerah mampu mempertahankan bahkan meningkatkan pencapaian dari tahun sebelumnya.

Menurut (Rosida et al. 2011) “pada penelitian yang berjudul analisis laporan keuangan sebagai dasar penilaian terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kota palopo”. menyimpulkan bahwa hasil perhitungan untuk rasio efektifitas dan efisiensi pendapatan asli daerah kota palopo, kinerja keuangan pemerintah kota palopo dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan belum efektif karena rasio efektifitasnya belum mencapai 100%.

Menurut (Zakarian dan Ashrori, 2019) “dalam penelitiannya yang berjudul analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten lamongan”. diperoleh kesimpulan bahwa dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pajak daerah tergolong efisien, karena dengan biaya yang relatif sedikit pemerintah kabupaten lamongan dapat merealisasikan penerimaan PAD dan pajak daerah. Namun tingkat derajat desentralisasi, ketergantungan, kemandirian kinerja keuangan sangat rendah sehingga dalam kegiatan pemerintahannya masih bergantung kepada pemerintah pusat dan provinsi jawa timur.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti memutuskan untuk melakukan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di wilayah Propinsi Jawa Timur agar dapat mengukur, menilai, dan membandingkan kinerja keuangan masing-masing daerah.

METODOLOGI

Desain Penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk kualitatif deskriptif. Menurut sugiyono (2016) “kualitatif deskriptif adalah metode yang berdasarkan filsafat postpositivisme dipergunakan pada objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi”.

Menurut mukhtar (2013), “penelitian kualitatif deskriptif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan empat daerah, yaitu Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang, berdasarkan rasio keuangan dari tahun 2016 hingga 2020. Di Kota Surabaya, rata-rata rasio likuiditas (Rasio Lancar, Rasio Kas, dan Rasio Cepat) selama lima tahun menunjukkan hasil yang baik dengan nilai rata-rata di atas 1. Namun, terdapat penurunan signifikan dalam kas pada tahun 2019 dan 2020. Rasio modal kerja terhadap total aset rata-rata sebesar 2,5:1, yang menunjukkan kemampuan pemerintah untuk memenuhi hutangnya. Sementara itu, rasio solvabilitas rata-rata mencapai 75,25, mencerminkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban dengan kinerja terbaik pada tahun 2016 dan terendah pada tahun 2017.

Di Kota Malang, kinerja keuangan juga menunjukkan hasil yang baik, dengan rasio likuiditas yang stabil dan rasio modal kerja terhadap total aset rata-rata sebesar 9,5:1. Rasio solvabilitas rata-rata sebesar 416,34 menunjukkan kemampuan pemerintah dalam

memenuhi kewajiban dengan kinerja terbaik pada tahun 2019. Penurunan pada kas dan utang belanja yang terjadi selama periode ini juga turut mempengaruhi hasil rasio.

Kabupaten Malang menunjukkan kinerja yang baik dengan rasio likuiditas dan rasio modal kerja terhadap total aset yang stabil. Rasio solvabilitas rata-rata sebesar 170,37 mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya, dengan nilai tertinggi pada tahun 2016. Namun, perlu dicatat adanya peningkatan signifikan pada hutang lancar pada tahun 2017, yang mempengaruhi beberapa rasio keuangan.

Kota Batu juga menunjukkan kinerja keuangan yang baik dengan rasio likuiditas dan modal kerja terhadap total aset yang stabil. Rata-rata rasio solvabilitas sebesar 506,86 menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban, meskipun terdapat peningkatan hutang lancar yang signifikan pada tahun 2017. Secara keseluruhan, kinerja keuangan empat daerah ini dinilai baik, dengan berbagai tantangan yang dihadapi setiap tahunnya.

Pada Tahun Anggaran 2016 hingga 2020, Aset Pemerintah Kota Surabaya mengalami fluktuasi, mulai dari Rp. 38,134 triliun pada 2016 dan naik menjadi Rp. 41,176 triliun pada 2017, hingga mencapai Rp. 45,910 triliun pada 2020. Penurunan aset lancar sebesar -20.56% pada 2016 menunjukkan kondisi illiquid, yang dipengaruhi oleh penurunan kas daerah. Selama periode ini, investasi jangka panjang relatif stagnan dengan rata-rata 5.04% dari total aset. Aset tetap yang proporsinya mencapai 89.52% dari total aset menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya memiliki proporsi aset tetap yang tinggi, yang bisa mengganggu likuiditas. Penurunan signifikan pada aset lainnya terjadi pada 2019, mengurangi proporsi aset lain dari 2.43% menjadi 1.29%.

Di Kota Malang, aset pemerintah terus bertumbuh dari Rp. 5,527 triliun pada 2015 menjadi Rp. 6,498 triliun pada 2020, dengan pertumbuhan yang stabil setiap tahunnya. Proporsi aset lancar Kota Malang selama periode 2016-2020 mencapai rata-rata 9.86%, yang menunjukkan kondisi keuangan daerah yang ideal tanpa overliquid atau illiquid. Aset tetap Kota Malang rata-rata mencapai 82.03% dari total aset, menunjukkan pengelolaan aset tetap yang cukup seimbang untuk menjaga likuiditas. Sementara itu, proporsi investasi jangka panjang berada di 5.63%, dengan aset lainnya yang relatif kecil, rata-rata 2.49%, menunjukkan bahwa aset lain-lain tidak terlalu mengganggu likuiditas.

Kabupaten Malang juga menunjukkan pertumbuhan aset yang positif selama tahun anggaran 2016 hingga 2020. Rata-rata aset lancar Kabupaten Malang mencapai 7% dari total aset, dan investasi jangka panjang hanya 3.85%, menandakan kurangnya dorongan untuk berinvestasi. Aset tetap mencakup 88.06% dari total aset, menunjukkan pengelolaan aset tetap yang baik. Aset lainnya di Kabupaten Malang hanya mencakup rata-rata 0.63%, yang menunjukkan bahwa aset lainnya tidak signifikan dalam mempengaruhi likuiditas.

Sementara itu, Kota Batu mengalami kenaikan aset yang signifikan dari 2016 hingga 2019, sebelum sedikit menurun pada 2020. Proporsi aset lancar Kota Batu selama lima tahun ini mencapai 13.75%, menunjukkan kecenderungan peningkatan yang perlu diwaspadai agar tidak menjadi overliquid. Investasi jangka panjang di Kota Batu hanya mencapai rata-rata 1.61%, sementara aset tetapnya rata-rata 82.41% dari total aset. Aset lainnya mencapai 2.24% dari total aset, yang masih dalam batas aman untuk menjaga likuiditas.

Dalam hal kewajiban dan ekuitas, rasio utang Pemerintah Kota Surabaya terhadap ekuitas rata-rata hanya sebesar 1.37%, yang menunjukkan bahwa utang tidak membebani keuangan daerah. Namun, rasio utang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 12% memerlukan perhatian khusus. Kota Malang memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang lebih rendah, yaitu 0.34%, tetapi rasio terhadap PAD sebesar 4.07% sedikit membebani keuangan. Kabupaten Malang dan Kota Batu masing-masing memiliki rasio utang terhadap

ekuitas sebesar 0.62% dan 0.44%, dengan rasio terhadap PAD sebesar 6.75% dan 5.37%, yang menunjukkan tingkat kewajiban yang masih dalam batas wajar namun tetap perlu diawasi.

Berikut adalah ringkasan analisis realisasi pendapatan dan belanja pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Timur berdasarkan data keuangan dari tahun anggaran 2016 hingga 2020:

Pemerintah Kota Surabaya

1. **Rasio Kemandirian:** Rata-rata 157% (kategori tinggi), menunjukkan bahwa Kota Surabaya mampu mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. **Rasio Ketergantungan:** Rata-rata 36% (kategori rendah), menunjukkan bahwa Kota Surabaya tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat atau provinsi.
3. **Derajat Desentralisasi:** Rata-rata 52% (kategori sedang), menunjukkan kemampuan sedang dalam penyelenggaraan desentralisasi.
4. **Rasio Efektivitas PAD:** Rata-rata 110% (kategori sangat efektif), meskipun pada 2020 rasio ini menurun menjadi 85% akibat tidak tercapainya target PAD.
5. **Rasio Efektivitas Pajak Daerah:** Rata-rata 102% (kategori sangat efektif), tetapi turun menjadi 87% pada 2020 karena pandemi COVID-19.
6. **Derajat Kontribusi BUMD:** Rata-rata 3% (kategori sangat kurang), menggambarkan kontribusi BUMD yang rendah.

Pemerintah Kota Malang

1. **Rasio Kemandirian:** Rata-rata 39% (kategori rendah), menunjukkan Kota Malang belum optimal dalam mengelola PAD.
2. **Rasio Ketergantungan:** Rata-rata 70% (kategori sangat tinggi), menunjukkan ketergantungan yang signifikan pada transfer dari pemerintah pusat/provinsi.
3. **Derajat Desentralisasi:** Rata-rata 27% (kategori cukup), menunjukkan kemampuan moderat dalam desentralisasi.
4. **Rasio Efektivitas PAD:** Rata-rata 115% (kategori sangat efektif), tetapi turun menjadi 92% pada 2020 karena tidak tercapainya target PAD.
5. **Rasio Efektivitas Pajak Daerah:** Rata-rata 103% (kategori sangat efektif), namun turun menjadi 83% pada 2020 akibat pandemi.
6. **Derajat Kontribusi BUMD:** Rata-rata 4% (kategori sangat kurang), menunjukkan rendahnya kontribusi BUMD.

Pemerintah Kabupaten Malang

1. **Rasio Kemandirian:** Rata-rata 33% (kategori rendah), menunjukkan belum optimalnya pengelolaan PAD.
2. **Rasio Ketergantungan:** Rata-rata 70% (kategori sangat tinggi), menunjukkan ketergantungan yang besar pada transfer pemerintah pusat/provinsi.
3. **Derajat Desentralisasi:** Rata-rata 23% (kategori cukup), menunjukkan kemampuan moderat dalam desentralisasi.
4. **Rasio Efektivitas PAD:** Rata-rata 112% (kategori sangat efektif), menandakan efektivitas tinggi dalam mobilisasi PAD.
5. **Rasio Efektivitas Pajak Daerah:** Rata-rata 117% (kategori sangat efektif), dengan puncak pada 2020 sebesar 131%.
6. **Derajat Kontribusi BUMD:** Rata-rata 3% (kategori sangat kurang), menunjukkan kontribusi BUMD yang rendah.

Pemerintah Kota Batu

1. **Rasio Kemandirian:** Rata-rata 20% (kategori rendah sekali), menunjukkan ketergantungan tinggi pada sumber dana dari luar.

2. **Rasio Ketergantungan:** Rata-rata 82% (kategori sangat tinggi), menunjukkan ketergantungan besar pada transfer pemerintah pusat/provinsi.
3. **Derajat Desentralisasi:** Rata-rata 16% (kategori kurang), menunjukkan kemampuan rendah dalam desentralisasi.
4. **Rasio Efektivitas PAD:** Rata-rata 109% (kategori sangat efektif), tetapi mengalami fluktuasi yang signifikan.

Secara umum, data menunjukkan bahwa Kota Surabaya memiliki kinerja keuangan yang paling mandiri di antara keempat entitas, sementara Kota Batu menghadapi tantangan terbesar dalam hal kemandirian keuangan dan desentralisasi. Pandemi COVID-19 memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas pajak daerah di semua wilayah.

Ringkasan Analisis Keuangan Pemerintah Daerah (2016-2020)

A. Pemerintah Kota Surabaya:

1. **Pendapatan:** Selama 2016-2019, total pendapatan Kota Surabaya selalu melebihi anggaran yang ditetapkan. Namun, pada 2020 terjadi penurunan sebesar 9%, menjadi yang terendah dalam lima tahun.
2. **Belanja:** Realisasi belanja selama 2016-2020 rata-rata 89.62%, menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.
3. **Kesimpulan:** Kinerja keuangan dinilai baik, namun perlu peningkatan dalam optimalisasi pendapatan daerah.

B. Pemerintah Kota Malang:

1. **Pendapatan:** Pendapatan selalu melebihi anggaran hingga 2019, namun pada 2020 terjadi penurunan sebesar 2%.
2. **Belanja:** Realisasi belanja 2016-2020 rata-rata 80.83%. Kinerja terbaik pada 2019, namun hal ini menunjukkan adanya masalah dalam penganggaran.
3. **Kesimpulan:** Kinerja keuangan baik, tetapi perlu perbaikan dalam penyusunan anggaran untuk memastikan penyerapan belanja yang lebih efektif.

C. Pemerintah Kabupaten Malang:

1. **Pendapatan:** Pendapatan 2019-2020 selalu melebihi anggaran, mencerminkan penganggaran yang baik, terutama pada 2020 dengan penurunan anggaran karena pandemi.
2. **Belanja:** Rata-rata realisasi belanja 92%, menunjukkan pengelolaan anggaran yang baik.
3. **Kesimpulan:** Kinerja keuangan baik, namun perlu peningkatan dalam efisiensi belanja.

D. Pemerintah Kota Batu:

1. **Pendapatan:** Pendapatan 2017-2020 selalu melebihi anggaran. Namun, pada 2020 terjadi penurunan sebesar 3%.
2. **Belanja:** Realisasi belanja 2016-2020 rata-rata 81%. Kinerja terbaik pada 2019, meski masih ada masalah dalam penganggaran.
3. **Kesimpulan:** Kinerja keuangan baik dari sisi pendapatan, namun perlu perbaikan dalam pengelolaan belanja agar lebih optimal.

Analisis Arus Kas (2016-2020):

1. **Pemerintah Kota Surabaya:** Arus kas dari aktivitas operasi selalu positif, namun terjadi penurunan pada 2020 karena penurunan penerimaan pajak dan dana bagi hasil. Arus kas dari investasi selalu negatif karena penambahan aset tetap. Arus kas transitoris menunjukkan kinerja yang baik.

2. **Pemerintah Kota Malang:** Arus kas operasi positif hingga 2019, namun menurun drastis pada 2020. Arus kas investasi negatif, mencerminkan penambahan aset tetap. Arus kas transitoris menunjukkan kinerja yang baik tanpa defisit.
3. **Pemerintah Kabupaten Malang:** Arus kas operasi positif, namun menurun pada 2020 karena penurunan penerimaan pajak dan retribusi. Arus kas investasi negatif, mencerminkan penambahan aset tetap. Arus kas transitoris menunjukkan perbaikan pada 2019-2020.
4. **Pemerintah Kota Batu:** Arus kas operasi selalu positif, namun menurun pada 2020. Arus kas investasi negatif, mencerminkan penambahan aset tetap. Tidak ada arus kas transitoris.

Kesimpulan Umum: Kinerja keuangan dari keempat pemerintah daerah menunjukkan pengelolaan yang baik dari sisi pendapatan dan belanja. Namun, ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam optimalisasi sumber pendapatan dan pengelolaan belanja agar lebih efisien. Penurunan arus kas pada 2020 di hampir semua daerah disebabkan oleh dampak pandemi, terutama dalam penerimaan pajak dan dana transfer dari pemerintah pusat.

KESIMPULAN

Berdasarkan Analisis Aset Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

A. Pemerintah Kota Surabaya

Secara umum Kota Surabaya memiliki kinerja Keuangan yang baik, hal ini dapat ditinjau dari hasil Analisis Rasio Keuangan (Rasio Likuiditas, Modal Kerja terhadap Total Aset dan Rasio Solvabilitas) menunjukkan nilai dan *Prosentase* yang tinggi. Namun perlu diperhatikan bahwa, terjadi penurunan jumlah kas daerah pada Tahun Anggaran 2019 hingga Tahun Anggaran 2020, hal ini perlu menjadi perhatian karena dengan berkurangnya kas dapat mengganggu kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

B. Pemerintah Kota Malang

Secara umum Kota Malang memiliki kinerja Keuangan yang baik, hal ini dapat ditinjau dari hasil Analisis Rasio Keuangan (Rasio Likuiditas, Modal Kerja terhadap Total Aset dan Rasio Solvabilitas) menunjukkan nilai dan *Prosentase* yang tinggi. Namun ada rasio yang menunjukkan penurunan yakni rasio kas yang dipengaruhi oleh berkurangnya aset lancar yang dimulai tahun 2019- 2020 yang akan berdampak pada kinerja keuangan Pemerintah daerah kota malang. Sedangkan untuk rasio modal kerja dan juga rasio solvabilitas kota malang pada tahun 2018 - 2019 mengalami kenaikan yang sangat signifikan daripada tahun-tahun sebelumnya, berbeda dengan tahun 2019 – 2020 dimana rasio modal kerja dan rasio solvabilitas yang mengalami penurunan, hal ini terbukti dengan kemampuan pemerintah kota malang dalam memenuhi utang- utangnya yang disebabkan oleh beberapa indikator yakni aktiva lancar yang tinggi pada pos kas daerah, penurunan utang lancar serta penurunan utang belanja yang signifikan yang terjadi dalam rentang waktu antara tahun 2016 – 2020.

C. Pemerintah Kabupaten Malang

Secara umum kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang ditinjau dari Analisis Rasio Keuangan memiliki kinerja yang baik. dibuktikan dengan Rasio Likuiditas, Modal Kerja terhadap Total Aset dan Rasio Solvabilitas) menunjukkan Nilai dan *Prosentase* yang tinggi. Meskipun dalam masih kategori bagi namun perlu di perhatikan pada pos hutang harus menjadi perhatian khusus agar tidak membebani kinerja keuangan Pemerintah Daerah dan ditunjang dengan peningkatan total aktiva Pemerintah Kabupaten Malang selama Tahun Anggaran 2016-2020.

D. Pemerintah Kota Batu

Secara umum kinerja Keuangan Pemerintah Kota Batu ditinjau dari Analisis Rasio Keuangan memiliki kinerja yang baik. dibuktikan dengan Rasio Likuiditas, Modal Kerja terhadap Total Aset dan Rasio Solvabilitas) menunjukkan Nilai dan *Prosentase* yang tinggi.

2. Berdasarkan Analisis Kewajiban dan Ekuitas kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

A. Pemerintah Kota Surabaya

Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surabaya ditinjau dari Analisis Kewajiban dan Ekuitas memiliki kinerja yang baik, dimana kewajiban Pemerintah Kota Surabaya memiliki rata-rata kewajiban sebesar 1,37% terhadap Ekuitas. Namun Ini hasil dari rasio utang terhadap PAD yang menunjukkan *Prosentase* yang tinggi yaitu 12% ini dapat menjadi peringatan untuk Pemerintah Daerah agar mengevaluasi Jumlah Hutang nya.

B. Pemerintah Kota Malang

Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Malang ditinjau dari Analisis Kewajiban dan Ekuitas memiliki kinerja yang baik, meskipun kewajiban Pemerintah Kota Malang mengalami kenaikan namun jika ditinjau dengan hasil rasio utang terhadap ekuitas dan utang terhadap PAD nilainya masih sangat rendah. Kenaikan kewajiban disebabkan oleh utang belanja modal DAK yang digunakan untuk pembangunan jalan dan konstruksi dan belum diakuinya pendapatan diterima dimuka atas sewa tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah.

C. Pemerintah Kabupaten Malang

Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang ditinjau dari Analisis Kewajiban dan ekuitas memiliki kinerja Baik, dibuktikan dengan hasil perhitungan rasio yang yang rendah. Meski hasil analisis masuk dalam kategori baik namun Kewajiban Pemerintah Daerah mengalami kenaikan yang cukup besar, hal ini sebabkan oleh besarnya utang beban pada BLUD Puskesmas pada Tahun 2020 untuk penanggulangan wabah covid 19.

D. Pemerintah Kota batu

Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang ditinjau dari Analisis Kewajiban dan ekuitas memiliki kinerja Baik, dibuktikan dengan hasil perhitungan rasio yang yang rendah. Pada Tahun Anggaran 2017 terjadi kenaikan Kewajiban dikarenakan adanya pengadaan pakaian dinas berserta kelengkapannya untuk semua pegawai badan keuangan daerah. Dan untuk kewajiban jangka pendek juga mengalami kenaikan disebabkan oleh sedang berlangsungnya pembangunan pasar Kota Batu tahap 1.

3. Berdasarkan Analisis Realisasi Pendapatan dan Belanja Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

A. Pemerintah Kota Surabaya

Secara umum Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surabaya dapat dikatakan baik berdasarkan nilai Rasio Kemandirian, Rasio Ketergantungan, Derajat Desentralisasi, Rasio Efektivitas PAD, Efektivitas Pajak. Hal ini dapat dibuktikan bahwa Pemerintah Kota Surabaya dalam menjalankan Pemerintahannya tidak tergantung kepada Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Pusat karena *Prosentase* Rasio kemandirian yang tinggi dan juga *Prosentase* Rasio Ketergantungan yang rendah.

B. Pemerintah Kota Malang

Secara umum Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Malang dapat dikatakan kurang baik ini berdasarkan nilai Rasio Kemandirian, Rasio Ketergantungan, Derajat Desentralisasi. Hal ini sebabkan karena Pemerintah Kota Malang memiliki nilai rasio kemandirian yang rendah dan Rasio ketergantungan yang Tinggi. Ini menandakan bahwa Pemerintah Kota Malang dalam menjalankan pemerintahannya sangat tergantung kepada

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Namun untuk rasio efektivitas PAD dan efektivitas Pemerintah Kota Malang memiliki nilai Rasio yang tinggi, ini menandakan bahwa Pemerintah Kota Malang efektif dalam mengelola PAD dan pajak daerah.

C. Pemerintah Kabupaten Malang

Secara umum Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang dapat dikatakan kurang baik ini berdasarkan nilai Rasio Kemandirian, Rasio Ketergantungan dan Kontribusi BUMD dan Derajat Desentralisasi. Hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Malang dalam menyelenggarakan pemerintahannya sangat tergantung kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dan juga kontribusi dari BUMD yang sangat kecil. Namun Pemerintah Kabupaten Malang jika ditinjau dari Rasio Efektivitas PAD dan Pajak memiliki kinerja yang baik karena bisa mengelola PAD dan Pajaknya dengan efektif dan biaya yang kecil.

D. Pemerintah Kota Batu

Secara umum Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Batu dapat dikatakan kurang baik ini berdasarkan nilai Rasio Kemandirian, Rasio Ketergantungan dan Kontribusi BUMD dan Derajat Desentralisasi. Hal ini disebabkan Pemerintah Kota Batu dalam menyelenggarakan pemerintahannya sangat tergantung kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dan juga kontribusi dari BUMD yang sangat kecil. Namun kinerja Pemerintah Kota Batu jika ditinjau dari Rasio Efektivitas PAD dan Pajak memiliki kinerja yang baik karena bisa mengelola PAD dan Pajaknya dengan efektif dan biaya yang kecil.

4. Berdasarkan Analisis Arus Kas secara umum Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

A. Pemerintah Kota Surabaya

Secara keseluruhan dilihat dari Analisis Laporan Arus Kas Kota Surabaya memiliki Kinerja Keuangan yang baik, ditunjukkan dengan Arus Kas dari aktivitas operasi yang bersaldo positif ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak mengalami kesulitan keuangan, Arus kas dari aktivitas Investasi yang bersaldo negatif, ini menandakan pemerintah daerah aktif melakukan pembangunan fisik aset tetap yang ditandai dengan pengeluaran kas untuk belanja modal lebih besar dibandingkan penerimaan kas dari penjualannya aset tetap., Arus kas transitoris memiliki rata-rata yang positif mengindikasikan kondisi kesehatan keuangan daerah yang cukup baik karena terjadi surplus dana.

B. Pemerintah Kota Malang

Secara keseluruhan dilihat dari Analisis Laporan Arus Kas Kota Malang memiliki Kinerja Keuangan yang baik, ditunjukkan dengan Arus Kas dari aktivitas operasi yang bersaldo positif ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak mengalami kesulitan keuangan, Arus kas dari aktivitas Investasi yang bersaldo negatif, ini menandakan pemerintah daerah aktif melakukan investasi dalam bentuk pembangunan. Arus kas transitoris memiliki rata-rata yang positif mengindikasikan kondisi kesehatan keuangan daerah yang cukup baik karena terjadi surplus dana.

C. Pemerintah Kabupaten Malang

Secara keseluruhan dilihat dari Analisis Laporan Arus Kas Kabupaten Malang memiliki Kinerja Keuangan yang baik, ditunjukkan dengan Arus Kas dari aktivitas operasi yang bersaldo positif ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak mengalami kesulitan keuangan, Arus kas dari aktivitas Investasi yang bersaldo negatif, ini menandakan pemerintah daerah aktif melakukan investasi dalam bentuk pembangunan. Arus kas transitoris memiliki rata-rata yang positif mengindikasikan kondisi kesehatan keuangan daerah yang cukup baik karena terjadi surplus dana.

D. Pemerintah Kota Batu

Secara keseluruhan dilihat dari Analisis Laporan Arus Kas kota Batu memiliki Kinerja Keuangan yang baik, ditunjukkan dengan Arus Kas dari aktivitas operasi yang bersaldo positif ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak mengalami kesulitan keuangan, Arus kas dari aktivitas Investasi yang bersaldo negatif, ini menandakan pemerintah daerah aktif melakukan investasi dalam bentuk pembangunan. Arus kas transitoris memiliki rata-rata yang positif mengindikasikan kondisi kesehatan keuangan daerah yang cukup baik karena terjadi surplus dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, Wulandari. 2001. Kemampuan Keuangan Daerah, Kebijakan dan Administrasi Publik (Vol.5 No.2 November)
- Farida., et al. 2019. Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten subang, jurnal, subang
- Fahmi, Irham. 2011. Analisis Kinerja Keuangan. Jakarta: CV. Alfabeta
- Faud, Ramli M. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Cetakan pertama. Bogor: Ghalia Indonesia
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi ketiga. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul dan Kusufi, Syam. 2014. Akuntansi Sektor Publik. Edisi kedua. Jakarta: Salemba Empat
- Natalia, Listiani dan Astuti, Tutut Dewi. 2015. Analisis Laporan Keuangan dalam mengukur kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten sleman. Universitas Mercu Buana Yogyakarta
- Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi ketiga. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat
- Menteri Dalam Negeri Republik Indoneisa. 1996. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan
- Menteri Dalam Negeri Republik Indoneisa. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan keuangan daerah
- Menteri Dalam Negeri Republik Indoneisa. 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
- Menteri Dalam Negeri Republik Indoneisa. 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 pasal 3 tentang Pengelolaan keuangan daerah
- Mokodompit Sandy Paramitha. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kota kotamobag. Universitas Sam Ratulangi Manado
- Presiden Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Rahayu, Sri., et al. 2009. Analisis Kinerja Anggaran Keuangan Daerah Pemerintah Kota Jambi Di Lihat Dari Perspektif Akuntabilitas, Jurnal, Kampus Pinang Masak, Mendalo Darat, Jambi
- Rahima., et al. 2020. Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah, jurnal, medan
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 5 tentang Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2 tentang Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Daerah
- Republik Indonesia. 2010. Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan.
- Rosida., et al. 2011. Analisis Laporan Keuangan sebagai dasar penilaian terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kota palopo, jurnal, palopo

Saputra., et al. 2018. Analisis Kinerja Keuangan pemerintah daerah dakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di kabupaten jembrana, jurnal. Bali

Tantri Bararoh. 2022. Konstruksi Pengelolaan Keuangan Daerah. Malang: Peneleh

Zakaria Anshori. 2019. Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten lamongan, jurnal, universitas islam lamongan, lamongan